



Kebijakan Sosial

By: Grathia Pitaloka

Indonesia

- Ratio gini -ukuran ketimpangan antara si kaya dan si miskin-, meningkat dari 0,3 di tahun 2000 menjadi 0,42 di tahun 2014.
- Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ketimpangan ekonomi paling pesat se-Asia Tenggara. (Indrakesuma, *et al*, 2015)
- *Reseach Institute* merilis "Global Wealth Report", dimana 1% orang kaya di Indonesia menguasai 49,3 % dari total kekayaan se-nusantara.
- Ukuran miskin di setiap daerah berbeda. Di Jakarta, seseorang dikategorikan miskin bila memiliki pendapatan di bawah Rp 637.260 per kapita per bulan. Sementara di NTT angkanya lebih rendah yakni Rp384.880 per kapita per bulan.





Fun Fact

Oxfam menyebut gabungan 4 orang kaya Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dibanding 40% penduduk miskin -sekitar 100 orang-. Akumulasi kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir orang menjadi "normal baru" yang menggambarkan wajah ekonomi-politik Indonesia dalam waktu panjang.

Aliran Oligarki

Kesenjangan ekonomi merupakan anak kandung struktur ekonomi-politik yang dikuasai elite predatoris. Kelompok ini berpendapat dalam sistem politik yang dikuasai kelompok kaya, opini publik orang biasa tak berguna (Winters, 2001; Hafidz dan Robinson, 2011)





Aliran Pluralis

Politik Indonesia sangat kompetitif. Terlepas dari kenyataan adanya ketimpangan sosial ekonomi, kelompok *civil society* dan kaum miskin dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan kebijakan publik. (Aspinal, 2014; Liddle, 2014; Ford, 2014)

Kebijakan



EALAU DAN PREWITT

Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu)

KAMUS WEBSTER

Prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

TITMUSS

prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented).



Sosial

Conyers (1992: 10-14) mengelompokkan kata sosial ke dalam 5 pengertian:

1. Kegiatan sehari-hari yang bersifat hiburan atau sesuatu yang menyenangkan seperti olah raga, rekreasi maupun bermusik.
2. Lawan kata individual. Sosial disini digambarkan sebagai kelompok atau masyarakat.
3. Istilah yang melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang. Contohnya pembangunan sosial diartikan sebagai pembangunan manusia.
4. Lawan kata ekonomi. Dalam pengertian ini kata sosial berkonotasi dengan aktivitas masyarakat yang tidak berorientasi mencari keuntungan finansial.
5. Berkaitan dengan hak asasi manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.



Kebijakan Sosial

"Kebijakan yang menyangkut aspek sosial dalam pengertian sempit, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial."- *Conyers, 1992.*

"Strategi, tindakan, atau rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial." -*Huttman, 1981*

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan- *Marshall, 1965*

Perencanaan untuk mengatasi biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial -*Rein, 1970*



Kebijakan Sosial

Satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk tujuan sosial- *Magil, 1986.*

Kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*), baik dalam arti luas yang menyangkut kualitas hidup manusia maupun dalam arti sempit yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat- *Spicker, 1995.*

Studi mengenai peranan negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya
-*Hill, 1996.*

Apa yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya
-Bessant, Watts, Dalton dan Smith 2006.

Fungsi Kebijakan Sosial

PREVENTIF
(Pencegahan)



KURATIF
(Penyembuhan)



PENGEMBANGAN
(developmental)



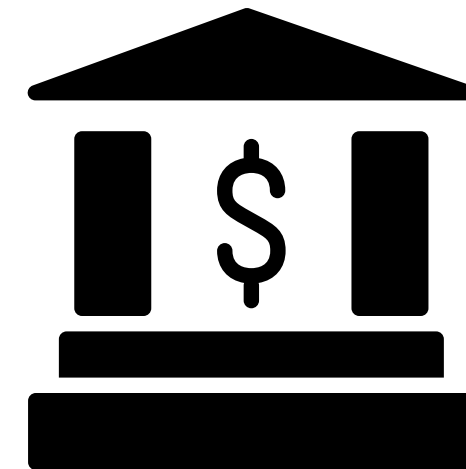
Pengategorian Kebijakan Sosial



Perundang-
undangan



Program
Pelayanan Sosial



Sistem
Perpajakan

Kebijakan Sosial

Setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.



Perumusan Kebijakan Sosial

Identifikasi



Implementasi



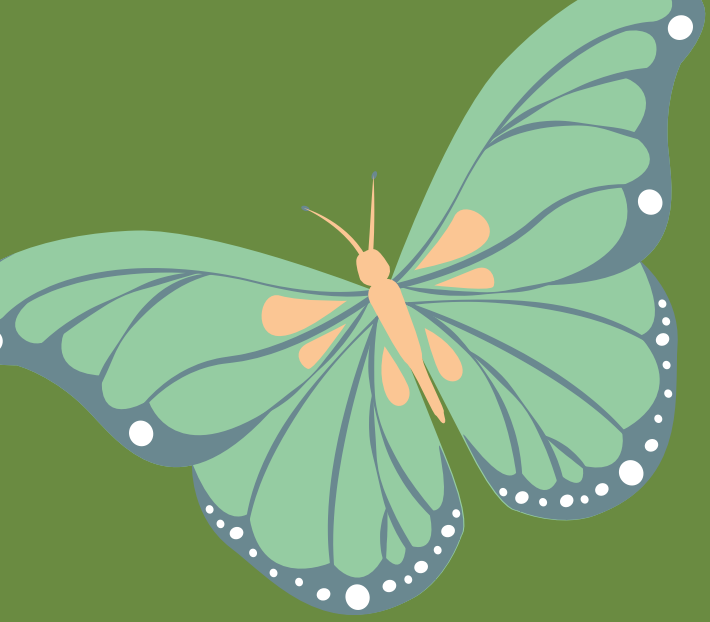
Evaluasi





Identifikasi

1. Identifikasi masalah dan kebutuhan.
2. Analisis masalah dan kebutuhan.
3. Penginformasian rencana kebijakan.
4. Perumusan tujuan kebijakan.
5. Pemilihan model kebijakan.
6. Penentuan indikator sosial.
7. Membangun dukungan dan legitimasi publik.



Implementasi

1. Perumusan Kebijakan: Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.
1. Perancangan dan Implementasi Program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposals) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.



Evaluasi

Dilakukan terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini, dirumuskanlah kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya atau perumusan kebijakan baru.





Mekanisme Kebijakan Sosial

1. Departemen pemerintahan.
2. Badan Perencanaan Nasional (Bapenas), lembaga khusus yang menangani berbagai perencanaan sosial sekaligus perumusan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional.
3. Badan legislatif DPR memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan sosial.
4. Pemerintah Daerah dan Masyarakat Setempat.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat.



Isu-isu Kebijakan Sosial

1. Peran negara dan masyarakat. Perumusan kebijakan sosial mensyaratkan adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam hal pembagian peran dan kekuasaan pemerintah dan masyarakat.
2. Perangkat Hukum dan Penerapannya. Kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif apabila dinyatakan secara tegas melalui perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.

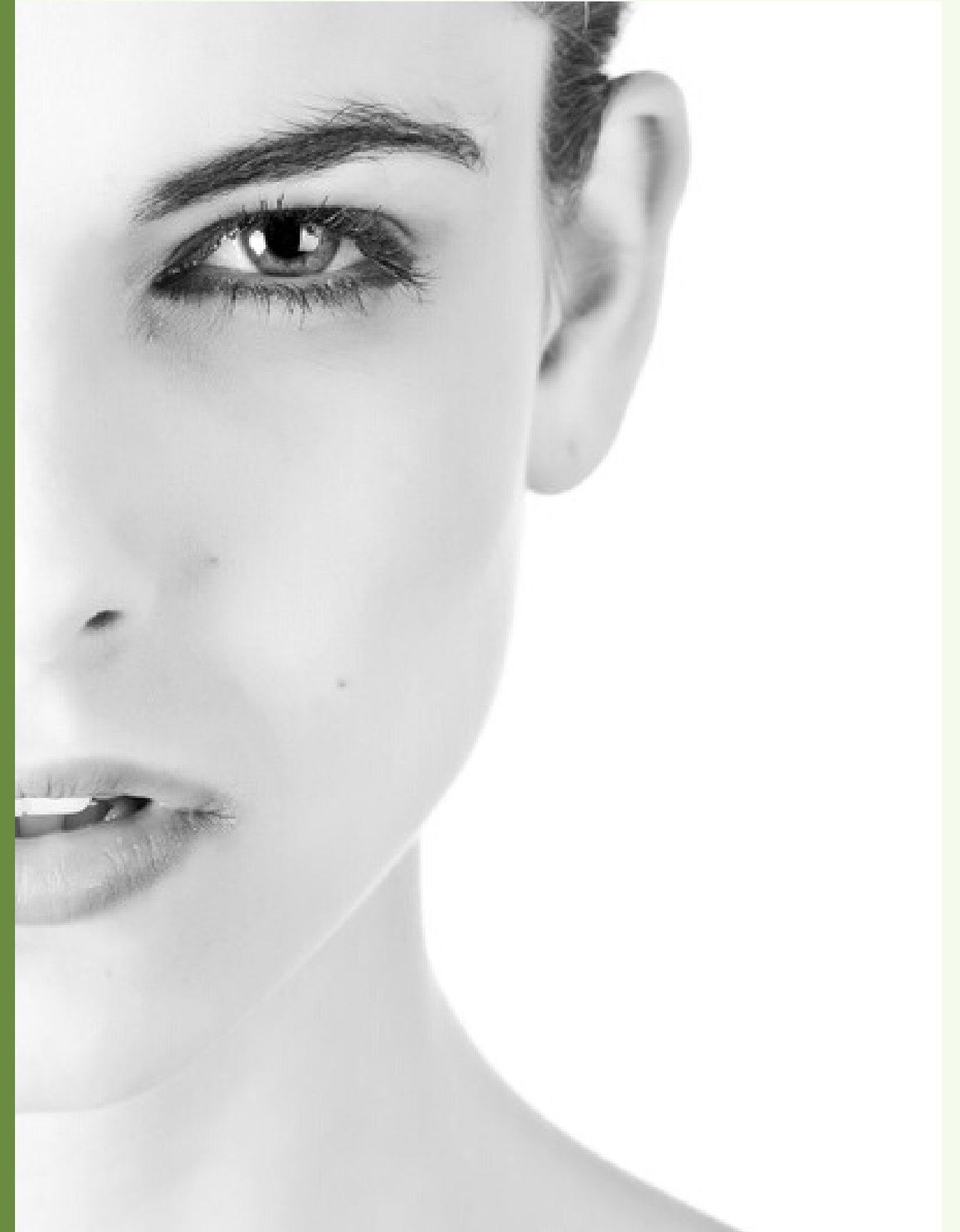


Isu-isu Kebijakan Sosial

3. Koordinasi antar Lembaga agar kebijakan sosial tidak tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lain.
4. Pelayanan sosial sebagai investasi sosial yang berkorelasi positif dengan kualitas hidup masyarakat.
5. Prioritas pelayanan sosial yang benar-benar penting dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
6. Penentuan bentuk pelayanan sosial yang sesuai dengan kondisi setempat, ditinjau dari segi fisik, ekonomi, sosial dan politik negara yang bersangkutan.

Isu-isu Kebijakan Sosial

1. Pendistribusian pelayanan sosial berdasarkan segi geografis (desa, kota, daerah khusus), gender (pria, wanita, atau waria), usia (anak, remaja, manula) atau berdasarkan permasalahan-permasalahan khusus yang mendesak untuk segera dipecahkan..
2. Penetapan kuantitas atau kualitas pelayanan sosial.
3. Pembiayaan pelayanan sosial.





Mekanisme Kebijakan Sosial

1. Departemen pemerintahan.
2. Badan Perencanaan Nasional (Bapenas), lembaga khusus yang menangani berbagai perencanaan sosial sekaligus perumusan kebijakan sosial dalam pembangunan nasional.
3. Badan legislatif DPR memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan sosial.
4. Pemerintah Daerah dan Masyarakat Setempat.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pilihan kebijakan sosial:

Latihan

1. Kenaikan iuran BPJS
2. Jembatan Penyebrangan Orang tanpa atap.
3. Penetapan UMR tahun 2020

Uraikan:

1. Bagaimana citra yang terbentuk dari kebijakan sosial tersebut?
2. Bila citra yang terbentuk buruk, bagaimana cara memperbaikinya? Bila citra yang terbentuk baik, bagaimana cara memperkuatnya?
3. Klasifikasi jenis isu yang mungkin muncul dari kebijakan ini: berdasarkan sumber, dampak yang ditimbulkan serta keluasan aspek?
4. Susun skema The Stakeholders Map-nya
5. Pilih salah satu strategi untuk manajemen isu yang muncul dan uraikan penyelesaiannya?
6. Untuk membentuk opini publik agar mendukung kebijakan tersebut, agenda setting seperti apa yang Anda lakukan?

